



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1>

Received: 8 November 2023, Revised: 30 November 2023, Publish: 14 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa

Canra Purnama<sup>1</sup>, M. Ied Al-Munir<sup>2</sup>, Muh. Rusydy<sup>3</sup>, Aprizal Wahyudi Dibrata<sup>4</sup>

<sup>1</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

Email: [canrapurnama99@gmail.com](mailto:canrapurnama99@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha, Jambi, Indonesia

Email: [m.iedalmunir@uinjambi.ac.id](mailto:m.iedalmunir@uinjambi.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha, Jambi, Indonesia

Email: [drmuhammadrusydi@gmail.com](mailto:drmuhammadrusydi@gmail.com)

<sup>4</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

Email: [awd960401@gmail.com](mailto:awd960401@gmail.com)

Corresponding Author: [canrapurnama99@gmail.com](mailto:canrapurnama99@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to answer the following problems: (1) Abdurrahman Wahid's political thought concept. (2) PKB Political Thought. (3) The influence of Abdurrahman Wahid's political thoughts on PKB political policies. The type of research is qualitative with a research approach, namely a sociological and political approach. The data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques were carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusions. The results of this research show the concept of Abdurrahman Wahid's thinking referring to the teachings of Indonesian Islamic values which are framed in Pancasila and the Constitution. Abdurrahman Wahid's thoughts became the PKB's political vision regarding the state, nationalism, pluralism, which can be seen through the PKB's policies in Jambi which refer to Abdurrahman Wahid's thoughts. The state is present to provide facilities to the community. Carrying out interfaith dialogue activities, sharing basic necessities in joint mourning activities as a reflection of a sense of nationalism and humanism. Assistance activities for the community to obtain religious freedom according to their beliefs as an attitude of pluralism. The implications of this research answer the need for an indication of Abdurrahman Wahid's thoughts in the Jambi PKB Party as an excellent concept of thought to implement for the progress of the nation and state. One example is the birth of study groups with the names Gemasaba, Lakumham and Garda Bangsa.*

**Keyword:** *Political, PKB, Abdurrahman Wahid, Nasionalisme*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: (1) Konsep pemikiran politik Abdurrahman Wahid. (2) Pemikiran Politik PKB. (3) Pengaruh pemikiran Politik Abdurrahman Wahid terhadap kebijakan politik PKB. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian yakni pendekatan sosiologis dan politik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan

analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep pemikiran Abdurrahman Wahid merujuk pada ajaran nilai-nilai Islam keindonesiaan yang dibingkai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pemikiran Abdurrahman Wahid menjadi visi politik PKB tentang negara, nasionalisme, pluralisme, dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan PKB di Jambi yang merujuk pada pemikiran Abdurrahman Wahid. Negara hadir memberikan fasilitas terhadap masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dialog lintas Agama, berbagi sembako dalam kegiatan duka bersama sebagai cerminan rasa nasionalisme dan humanisme. Kegiatan pendampingan kepada masyarakat untuk mendapatkan kebebasan beragama sesuai kepercayaan yang diyakininya sebagai sikap pluralisme. Implikasi penelitian ini menjawab perlunya indikasi pemikiran Abdurrahman Wahid dalam Partai PKB Jambi sebagai konsep pemikiran yang sangat baik untuk dilaksanakan demi kemajuan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah lahirnya kelompok kajian dengan nama Gemasaba, Lakumham dan Garda Bangsa.

**Kata Kunci:** *PKB, Islam, Negara, Nasionalisme, Pluralisme*

---

## **PENDAHULUAN**

Abdurrahman Wahid dilahirkan di denanyar, dekat Kota Jombang, Jawa Timur, dirumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya K. H. Bisri Syansyuri, Pada tanggal 7 September 1940. K. H. Bisri Syansuri dan K. H. Hasyim Asy'ari, kedua kakek Abdurrahman Wahid sangat dihormati dikalangan NU, baik karena peran mereka dalam mendirikan NU maupun karena posisi mereka sebagai ulama. Ketika Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden pada bulan oktober 1999, dunia luar yang mengamatinya hal ini tidak tahu bagaimana mereka harus bersikap, yakni ketika mereka mendengar bahwa presiden Indonesia yang pertama kali terpilih secara demokratis adalah seorang Kiai.

Abdurrahman Wahid adalah salah satu dari banyak tokoh masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai pemikir, penulis, dan politikus Islam. Banyak dari karya dan pemikirannya dalam melakukan pembaharuan pemikiran politik di tanah air membuat Abdurrahman Wahid dikenal saat ini sebagai seorang tokoh intelektual muslim paling berpengaruh di Indonesia. Abdurrahman Wahid adalah seorang aktivis yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan membela prinsip-prinsip persamaan di depan hukum dan konstitusi. Abdurrahman Wahid bertujuan melindungi warga negara dari tirani dan kesewenangan penguasa yang tercermin dalam 9 (sembilan) nilai utama Abdurrahman Wahid ajaran yang dimiliki tentang unsur terpenting bagi kemanusiaan Indonesia yaitu pembebasan.

Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid banyak membicarakan tentang konsep Islam yang berkaitan dengan sistem kenegaraan, juga memberi pandangan terhadap kebudayaan, politik, ideologi, demokrasi, juga tak kalah penting adalah berbicara tentang kemanusiaan yang dibingkai dalam konsep pluralisme. Tidak mengherankan jika Abdurrahman Wahid mewakili banyak masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru masa itu yang melanggar hak masyarakat.

Hubungan Islam dan Negara dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid yang menjelaskan ajaran tentang Negara dalam Islam tak mempunyai dasar yang jelas. Islam lebih mengedepankan pengajaran nilai-nilai keadilan untuk menuju masyarakat makmur, ini adalah kehendak Islam. Terpenting bagi Abdurrahman Wahid adalah terpenuhinya tiga kriteria, yaitu: Pertama, mengutamakan prinsip musyawarah. Kedua, keadilan ditegakkan. Ketiga, adanya jaminan kebebasan (alhurriyyah). Ide-ide Abdurrahman Wahid selalu didasarkan pada prinsip tujuan, kinerja, dan pencapaiannya. Abdurrahman Wahid menyakini bahwa tujuan bernegara demi kesejahteraan masyarakat mengisi nilai-nilai moralitas dalam menjalani

kehidupan sehingga martabat kemanusiaan manusia dapat tercapai karena manusialah yang menjadi objek penyesuaian hidup.

Pandangan dan sikap tersebut tampaknya juga memengaruhi kecenderungan Abdurrahman Wahid untuk mengadopsi pendekatan kultural dalam implementasi struktural sosialisasi dan pelebagaan Islam. Menurutnya, ajaran Islam lebih utama sebagai kekuatan politik namun tidak sebagai ideologi, sehingga Islam dalam konteks kehidupan bernegara hanya menjadi landasan etika moral. Abdurrahman Wahid tidak ingin orang lain menjadi terpinggirkan atau warga kelas dua melalui sosialisasi Islam. Untuk menyatukan pemikiran tersebut, Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya di tulis PKB) pada 23 Juni 1998. Partai ini merupakan sayap politik NU dibawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Partai inilah yang nantinya mengantarkan Abdurrahman Wahid pada puncak kepresidenan Republik Indonesia pada pemilihan secara demokratis tahun 1999.

Abdurrahman Wahid merupakan Pendiri PKB. Partai yang didirikan pada awal reformasi 1998 ini, merupakan partai politik yang lahir dari rahim NU. Abdurrahman Wahid yang ketika itu masih jadi Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama) merupakan figur sentral partai ini. Garis perjuangan dan ideologinya adalah garis perjuangan yang sejak lama diperjuangkan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid juga kader terbaik yang dimiliki NU, selain karena wawasannya yang luas dan banyak pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid yang dituangkan pada NU, Abdurrahman Wahid juga mempunyai garis keturunan langsung dengan K. H. Hasyim Asy'ari pendiri NU. Abdurrahman Wahid tidak hanya rajin memproduksi atau mereproduksi gagasan-gagasan asli melalui tulisan dan serpihan-serpihan lontaran, tapi juga mengimplementasikan melalui kepemimpinannya di organisasi Keagamaan NU. PKB merupakan salah satu kekuatan politik yang dapat mengawal komitmen ke-Indonesiaan, karena PKB mempunyai komitmen total atas kelangsungan negara dengan konsepsi dasar ideologi Pancasila sebagai kekuatan politik.

Abdurrahman Wahid menekankan bahwa manifestasi kelahiran PKB merupakan perwujudan hubungan antara politik dan agama yang keduanya bisa seiring berjalan, karena PKB mendahulukan kepentingan nasional disaat yang sama berupaya untuk menyelaraskan antara hukum-hukum fikih dan hukumhukum nasional. Sebagaimana diketahui Indonesia bukanlah negara agama. Meskipun ada adagium yang menyatakan *the power thands to corrupt*, namun upaya preventif telah diupayakan dalam statute PKB untuk mencegah terjadinya hal itu dengan menempatkan ulama sebagai pemimpin tertinggi dalam strata jabatan fungsionaris partai. Langkah ini dilakukan karena ulama merupakan sosok yang memiliki karismah serta ahlak yang mampu mencegah penyalagunaan kekuasaan. Upaya memperjuangkan nilai keagamaan yang dilakukan oleh PKB sejatinya tidaklah menggunakan jalur strukturalis ideologis dimana hal itu menjadikan agama sebagai ideologi negara. Namun perjuangan PKB berupaya menjadikan islam sebagai nilai luhur serta inspirasi melalui sistem yang disebut Abdurrahman Wahid sebagai sistem eklektik, yakni agama bisa menginherenkan dirinya kedalam sistem nilai kebangsaan hal ini bisa kita lihat seperti pada inherennya sistem perbankan syariah yang secara struktural tidak masuk masuk dalam kebijakan negara dan sistem ekonomi negara namun mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada negara.

Abdurrahman Wahid merupakan figur penting pada partai ini, karena dengan perangkat ketokohan intelektualitas dan reputasi baik yang dimiliki Abdurrahman Wahid, ia mampu membesarkan PKB, yang mampu menata hubungan Islam dengan politik pada PKB. Tanpa Abdurrahman Wahid, PKB rasanya sulit untuk tumbuh dan berkembang. Visi dan kebijakan-kebijakan politik PKB akan selalu dibawah bayangan Abdurrahman Wahid, karena Abdurrahman Wahid yang mengarahkan dan bahkan menentukan keputusan- keputusan politik yang telah dan akan diambil oleh PKB. Selain sebagai pengayom dan pemberi restu bagi berdirinya PKB, Abdurrahman Wahid secara intelektual memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengarahkan kebijakan atau keputusan-keputusan politik yang harus

diambil oleh PKB. Abdurrahman Wahid juga merupakan seseorang yang diakui sebagai pembela kebebasan, demokrasi dan HAM yang memiliki reputasi bagus di tingkat nasional dan internasional. Tentu saja ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi PKB. Karena itu pengaruh Abdurrahman Wahid dalam PKB sangat dominan. Maka ideologi Abdurrahman Wahid akan selalu menjadi pola anutan dan acuan PKB dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan politiknya.

Pada tahun 2008 terjadi konflik di dalam tubuh PKB yang cukup rumit. Pada saat forum Mahfud MD berpamitan untuk menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi tiba-tiba berubah menjadi rapat rutin gabungan Ketua DPP PKB yang membahas munculnya isu pihak-pihak yang ingin menggelar Muktamar Luar Biasa. Isu itu dinilai untuk menggoyang Abdurrahman Wahid dari Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Rapat internal itu akhirnya berujung pada dicopotnya Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Konflikpun berlanjut dan berimplikasi pada dikotomisasi PKB; yaitu PKB kubu Abdurrahman Wahid dan PKB kubu Muhaimin Iskandar. Pada akhirnya konflik ini dihentikan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung, yang memutuskan struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005. Abdurrahman Wahid tetap sebagai Ketua Umum Dewan Syura, dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Dari deskripsi diatas, jelas bahwa Abdurrahman Wahid sangat berpengaruh pada percaturan politik PKB, banyak sekali pemikiran dan pendapat Abdurrahman Wahid yang dituangkan di dalamnya sehingga membawa keuntungan terhadap PKB. Atas Dasar Pemikiran Tersebut Penulis Tertarik Mengangkat Judul Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Dan Pengaruhnya Terhadap Politik PKB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada Masalah utama yang akan diteliti dalam Tesis ini adalah bagaimana Pengaruh Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid terhadap politik Partai Kebangkitan Bangsa?, Masalah utama ini akan diurai dalam tiga sub pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid?
2. Bagaimana Pemikiran Politik PKB?
3. Bagaimana Pengaruh Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Terhadap Politik PKB?

## **METODE**

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif dan tinjauan pustaka (Library Research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku dan jurnal baik offline di perpustakaan maupun online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu; jenis penelitian kualitatif ini. Secara umum dalam setiap pembahasan penelitian diperoleh literatur dan sumber, dan atau temuan terkini mengenai peran kepemimpinan dalam organisasi lembaga pendidikan Islam. Kedua, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan masing-masing sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan terkadang bersifat deskriptif dan juga bersifat historis (Kaelan, 2010).

Dalam penelitian kualitatif, tinjauan pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan yang diajukan peneliti. Salah satu alasan utama dilakukannya penelitian kualitatif adalah karena penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali, H., & Limakrisna, 2013).

Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan buku harus dilakukan secara bertahap, karena untuk mendapatkan seluruh kebutuhan tersebut di atas dapat dihasilkan melalui perpustakaan, buku, artikel, atau jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, dengan menggunakan data dari berbagai sumber. Referensi-referensi tersebut dikumpulkan dengan cara membaca (text reading), mengkaji, mempelajari, dan

mencatat literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan mengidentifikasi wacana dari buku, makalah, atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), atau informasi lain yang berkaitan dengan penulisan judul untuk mencari hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kajian peran kepemimpinan dalam organisasi lembaga pendidikan Islam. Sedangkan sebagai model analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Konsep Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Pada Partai Kebangkitan Bangsa**

Menurut Abdurrahman Wahid Agama saja tidak cukup untuk membentuk sebuah negara. Dalam pembentukan negara, diperlukan perasaan ashabiya (perasaan solidaritas) di samping pemahaman agama. Tujuannya adalah untuk menjalin ikatan sosial. Agama membentuk dan mengajarkan nilai-nilai sosial bermasyarakat dalam suatu Negara. Agama dan Negara saling menguatkan satu sama lain untuk keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Abdurrahman Wahid menawarkan dua hal untuk menetralsir ketegangan antara kedua belah pihak. Pertama, menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, mengembangkan Islam sesuai dengan konteks lokal, atau yang biasa disebut dengan indigenisasi Islam. Dan kedua tawaran tersebut membuat Islam diposisikan sebagai faktor pelengkap dalam kehidupan sosial budaya dan politik di Indonesia.<sup>1</sup>

Abdurrahman Wahid memberi penegasan bahwa Islam bertugas melestarikan ajaran nilai luhur dan perilaku sosial yang berkaitan dengan pencapaian kemudian sebagai tujuan Islam. Islam berfungsi sebagai etika sosial yang memandu jalannya bernegara bukan sebagai mekanisme bernegara. Argumentasi ini menunjukkan konsistensi Abdurrahman Wahid dalam perjuangan demokrasi dan semangat pluralism di negeri ini.<sup>2</sup>

Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa hukum agama tidak akan kehilangan kebesarannya sebagai fungsi moralitas dalam bermasyarakat, bahkan kebesarannya akan terus memancar, karena mampu mengembangkan diri tanpa dukungan penuh dari institusi negara. Menjalankan agama Islam artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah, adalah tujuan keinginan yang luhur. Karena itulah Islam harus dihindarkan dan tidak diletakkan dibawah wewenang negara, melainkan menjadi kesadaran yang kuat dari warga masyarakat. Allah mengutus Nabi Muhammad Saw diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. jika Abdurrahman Wahid diartikan sebagai pengembangan kesadaran mendalam terhadap masyarakat suatu bangsa. Hal senada disampaikan oleh wakil ketua DPW PKB Jambi dalam sebuah wawancara Bersama penulis :

PKB itu adalah partai yang rahmatan lil alamin. Yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin itu adalah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat yang membawa kesejukan bahwa kita sebagai manusia harus mampu menjadi manusia yang baik bermanfaat untuk masyarakat banyak.<sup>3</sup>

Penulis menilai PKB berupaya untuk membuat sebuah skema politik yang berdasarkan nilai-nilai agama. Mencitrakan diri sebagai partai yang santun serta mengedepankan kepentingan bersama untuk semua elemen bangsa. Misi rahmatan lil alamin dari partai PKB ingin menunjukkan bahwa kehadiran nilai-nilai Islam dibutuhkan untuk tidak di persepsikan bahwa partai bukan hanya semata mengurus masalah pragmatisme golongan melainkan sebagai partai yang hadir di masyarakat sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya.

---

<sup>1</sup>Aditya Pramana, *Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Politik* (Medan : UNSUT, 2007), 36.

<sup>2</sup>M Arif Kurniawan, *Politik Islam Modern Dalam K.H Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017), 97.

<sup>3</sup>Muhammad Jupri, Wawancara Dengan Penulis, 10 Oktober 2023.

Politik rahmatan lil alamin menjadi mandat PKB sebagai sebuah pijakan politiknya. Itu adalah sebaik-baiknya konsep islam politik dan ekonomi yang perlu dikembangkan. Semacam jembatan yang mempertemukan konsep religi dan kebangsaan. Pandangan Abdurrahman Wahid terkait dengan politik Islam pada dasarnya merupakan pandangan yang sekularistik yakni upaya memisahkan urusan agama dan politik. Konsepsi ini sesuai dengan pandangan Ali Abdul Raziq. Abdurrahman Wahid mengadopsi paradikma yang menegaskan negara dan agama sama sekali tidak memiliki hubungan secara struktural namun disaat yang sama agama dapat sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup>

Dalam diskursus politik Islam setidaknya terdapat tiga teori terkait hubungan antara Islam dan negara yakni : teori integralistik, teori simbiotik, dan teori sekularistik. Teori-teori tersebut dapat digunakan unruk mempersepsi corok pemikiran politik Islam yang salah satunya adalah perspektif NU terkait hubungan islam dengan negara terkhusus pada konteks keindonesiaan.<sup>5</sup>

Bagian awal yang perlu dijelaskan disini, bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid terhadap pemahaman Islam dalam konteks politik. Abdurrahman Wahid berpendapat, bahwa Islam tidak mempunyai konsep yang valid tentang menjalankan sebuah negara. Tentu, Islam sangat berhubungan erat dengan kehidupan politik, yakni dalam pengertian melakukan tranformasi sosial. Hanya wujud formatnya tidak memperlihatkan aturan yang tegas. Abdurrahman Wahid mengatakan:

Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktrin Islam tentang Negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan serta kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam.<sup>6</sup>

Demikian gagasan yang sangat bertentangan dengan ide Islam sebagai ideologi alternatif yang disedorkan oleh para tokoh fundamentalis Islam. Di luar negeri, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Khomeini, Sayyid Qutub, Almaududi dan tokoh lainnya. Menurut Abdurrahman Wahid, "idealisme yang begitu tinggi sehingga pemikiran mereka sulit dijalankan dalam kehidupan, karena sulit menemukan prinsip-prinsip oprasional dari nilai-nilai dasar kehidupan".

### **Pemikiran Politik PKB**

Jurnal Secara historis Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya ditulis PKB) dideklarasikan pada 23 juli 1998 tepat pada penanggalan Islam 29 Rabiul Awal 1419 H oleh Abdurrahman Wahid, K. H. Munasir Ali, K. H. Ilyas Ruchiyat, K. H. Mustofa Bisri serta K. H. A Muchith Muzadi. Hasil muktamar NU ke 27 yang dilaksanakan di Situbondo telah menetapkan bahwa NU tidak memiliki kaitan dengan partai politik manapun serta tidak melakukan kegiatan politik praktis. Hal ini diamini oleh Abdurrahman Wahid yang pada awalnya begitu prihatin dikarenakan banyaknya kelompokkelompok NU yang ingin mendirikan partai politik NU. Hal ini menyiratkan agama menjadi jualan politik partai. Pada saat yang sama, kehadiran NU sebagai ormas keagamaan sejatinya tidaklah boleh ditumpangi oleh politik praktis yang sarat akan berbagai kepentingan.<sup>7</sup>

Pada tahun 1998 presiden Soeharto lengser dan keran terbuka lebar. Saat itu ada desakan untuk membentuk partai politik yang berbasis NU. Pada saat itu, PBNU mendapat begitu banyak usulan dari warga NU seluruh Indonesia. Menyikapi hal ini PBNU akhirnya mengadakan rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah tertanggal 3 Juni 1998. Forum ini memutuskan untuk membentuk tim Lima yang diketuai oleh K. H. Ma'ruf Amin (Koordinaror harian PBNU) yang beranggotakan antara lain : K. H. M Dawam Anwar (Katib

<sup>4</sup>43 Khamami Zada, *Neraca Gus Dur di panggung kekuasaan* (Jakarta; lakusdam,1997),121.

<sup>5</sup> Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur : Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, 156.

<sup>6</sup>Abdurrahman Wahid, *Tuhan tak Perlu di Bela* (Yogyakarta : LkiS, 1999), 21.

<sup>7</sup>Taufik "Pemikiran Abdurrahman Wahid", 42.

Aam PBNU), DR. Said Aqil Siroj, M.A (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, SE, M.Sc ( Ketua PBNU) dan Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU). Rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah tersebut menghasilkan Lima rancangan yaitu pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, Mabda' Siyasih, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. Pada akhir Juni 1998 dikarenakan besarnya tuntutan terhadap PBNU oleh para Nahdiiyin diseluruh Indonesia, kemudian bersama para deklarator lainnya (K. H. Munasir Ali, K. H. Ilyas Ruchiyat, K. H. Mustofa Bisri serta K. H. A Muchith Muzadi) mendeklarasikan Partai PKB pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998.<sup>8</sup>

PKB pada saat kepemimpinan Abdurrahman Wahid diawal berdirinya. Tentu mempunyai tantangan dalam mewujudkan PKB untuk mendapatkan banyak pengaruh dan pengikut dalam masyarakat. Apalagi PKB adalah partai yang masih sangat muda dan ikut andil dalam kontekstasi politik pemilihan demokrasi di tahun 1999. Abdurrahman Wahid mempunyai tugas yang sangat besar untuk membesarkan PKB serta melawan dominasi partai-partai lainnya. Namun setiap kepemimpinan memiliki kader penerus untuk melanjutkan staped perjuangan partai. PKB merupakan partai terbuka dan sejalan dengan dinamika masyarakat sehingga kepemimpinan era Muhaimin Iskandar membawa PKB kearah partai yang lebih modern. Karena zaman sekarang adalah era digitalisasi tentu segala aspek kehidupan masyarakat berubah tak terkecuali PKB juga ikut andil dalam perubahan tersebut. Namun pokok perjuangan PKB tetap menjadi dasar dan jalan untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran masyarakat sesuai amanah dari pemimpi terdahulu.<sup>9</sup>

### **Pengaruh Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Terhadap Kebijakan Politik PKB**

Dalam Politik adalah suatu kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan yang disepakati untuk mendapatkan kebaikan bersama. Politik juga merupakan sebagai sebuah alat untuk mempertahankan kepercayaan pada masyarakat. Aristoteles berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Politik" bahwa politik merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok, yang memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Konsep ini menjadikan kepentingan umum sebagai tujuan moral serta nilai ideal yang sifatnya abstrak.<sup>10</sup>

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa politik merupakan sesuatu yang mesti ada didalam kehidupan bermasyarakat. Karena tanpa politik kehidupan masyarakat tidak akan tertata dengan baik. Sikap saling bantu membantu untuk mencapai tujuan tidak akan bisa terwujud. Oleh sebab itu politik adalah sebuah cara yang membuat kehidupan manusia dalam bermasyarakat dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan yang dicitacitakan.<sup>11</sup>

Teoritis politik harus dapat merealisasikan, dengan penuh kesungguhan yakni mengkolaborasi antara fenomena sosial dengan konsep politik. artinya bahwa teoritis politik harus mempunyai kemampuan dalam memahami bagaimana gagasan dan konsep-konsep, dan bagaimana pandangan ideologi itu lahir dari penomena yang terjadi didalam masyarakat mencoba untuk mentransformasikan mereka.

Pemikiran politik yang selalu muncul dalam masyarakat tertentu Pada hakekatnya mencerminkan upaya masyarakat untuk menemukan dan merancang apa yang mereka anggap sebagai sistem yang ideal, sebagai mekanisme yang mengatur proses atau pola kehidupan masyarakat sebagaimana mereka inginkan. Begitu pula dalam berbagai pemikiran politik yang muncul, campuran antara sudut pandang kritis, sudut pandang konservatif atau sudut

<sup>8</sup>"Naskah-Deklarasi," diakses pada 10-08-2023 <https://PKB.id/page/naskah-deklarasi>.

<sup>9</sup> Taufik, "Pemikiran Abdurrahman Wahid", 44.

<sup>10</sup> Alim Roswanto, " Filsafat Sosial-Politik Aristoteles dan Plato " Refleksi 15, No. 2 (2015): 126.

<sup>11</sup>Mukhamad Murdiono "Citra Penguasa Ideal dalam Perpektif Politik Ibnu Khaldun Dalam relevansinya Bagi Kepemimpinan di Indonesia", Jurnal Penelitian Humaniora 11. No. 2 (2006); 35.

pandangan yang mengandung ide-ide utopis. Masing-masing gagasan tersebut mencoba memberikan petunjuk seperti apa sistem politik yang ideal dan bagaimana hal itu dapat dicapai atau diwujudkan. Pemikiran politik kemudian diakomodir dalam bentuk praksis melalui lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Apakah itu bentuk partai, organisasi masyarakat, LSM dan lembaga yang berkaitan dengan struktural pemerintahan.

PKB merupakan partai yang sejak berdirinya telah memproklamirkan diri sebagai mitra kritis pemerintah, artinya PKB tidak pernah menegaskan diri sebagai partai oposisi maupun partai pendukung pemerintah. Peran politik seperti ini diperankan oleh PKB agar aspirasi masyarakat senantiasa bisa Abdurrahman Wahidkomodir. Karena, bagi PKB politik merupakan wasilah dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

Formulasi tersebut beritik tolak dari pemahaman teologis yang menyatakan bahwa agama yang diturunkan kepada manusia memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada ummat manusia tanpa memandang perbedaan apapun. Oleh karenanya bagi PKB politik merupakan bagian dari pengejawantahan dari syariat.<sup>12</sup>

Ideologi yang diemban adalah ideologi yang berbeda dari partai-partai berhaluan islam lainnya. Hal ini terjadi karena PKB tidak menjadikan islam asas kepartaian disatu sisi namun menjadikan pancasila sebagai arus utama partai serta mengklaim sebagai partai bangsa/kebangsaan, disaat yang sama juga memperjuangkan nilai-nilai keagamaan. Karena di Indonesia pada dasarnya bukanlah negara agama akan tetapi merupakan negara pancasila yang sejalan dengan islam. Dampak dari sikap PKB yang menegaskan diri yang bukan partai islam pada akhirnya kehadirannya akan bisa diterima oleh kalangan non muslim. .

Tantangan PKB dalam perancangan politik nasional adalah berupaya memberikan solusi atas berbagai masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dengan cara melakukan penataan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Penataan secara internal, PKB harus menempatkan fungsi kedudukan dan perannya secara tepat, melaksanakan reorientasi serta reposisi secara benar. Secara eksternal, PKB harus mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan kemasyarakatan. PKB dalam memainkan perannya tidak boleh sekedar menjadi “Menara gading” dimana ia hanya akan memproduksi kader-kadernya untuk menempati posisi-posisi strategis dalam tampuk kekuasaan disaat yang sama ia harus menjadi pejuang partai yang memiliki integritas serta komitmen yang kuat dalam menyelesaikan setiap permasalahan kemasyarakatan yang dengan cara inilah diharapkan PKB akan lebih dicintai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

## KESIMPULAN

1. Konsep pemikiran Abdurrahman wahid berbicara tentang, Negara, nasionalisme, dan pluralisme di Indonesia menjadi tema pokok perjuangan Abdurrahman wahid dalam dimensi perpolitikan di Indonesia. Meskipun banyak juga kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid. namun Konsep pemikiran Abdurrahman Wahid ini layak untuk terus dibumikan di Negara Indonesia karena konsep pemikiran ini sejalan dengan ideologi pancasila. Abdurrahman Wahid menjadi salah satu pembaharu di bidang pemikiran islam pada abad ini .
2. PKB sebuah menjadi wadah untuk mengaktualisasikan visi Pemikiran Abdurrahman Wahid dalam bentuk praksis. Visi ialah PKB adalah rahmatan lil alamin yakni hadir ditengah-tengah masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi juga PKB hadir sebagai mitra kritis pemerintah. Misalnya memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami masalah hukum melalui lembaga hukum yang didirikan oleh kader-kader PKB. Mendampingi masyarakat terkait persoalan pertanian melauai reforma agraria, dan peraturan-peraturan daerah lain yang harus memberikan keuntungan masyarakat banyak.

---

<sup>12</sup>Efendy Choiri, *PKB dari NU untuk Indonesia* (Jakarta; Bildung, 2003), 41.

3. Pemikiran Abdurrahman Wahid tidak hanya berpengaruh di wilayah Jawa namun juga berpengaruh keseluruh pelosok negeri ini salah satunya wilayah Jambi. Hingga terbentuklah DPW PKB Jambi. Pengaruh pemikiran Abdurrahman Wahid pada partai PKB terkhusus di Jambi dapat dilihat melalui elektabilitas partai PKB sangat meningkat dari waktu ke waktu. Pada pemilu 2019 PKB memperoleh Kursi Ditingkat Provinsi menjadi 5 kursi, dan ditingkat pusat 58 Kursi. 1 kursi dari daerah pemilihan Jambi. Juga pengaruh pluralisme dapat kita lihat dengan kegiatan dialog lintas iman dengan kegiatan tersebut dapat memperkecil konflik yang mengatasnamakan isu agama. Mengecam para pelaku bom bunih diri atau tindakan terisme dengan melakukan seminar-seminar untuk menangkis paham-paham radikalisme. Melakukan haul Abdurrahman Wahid sebagai upaya merepleksi kembali perjuangan Abdurrahman Wahid. Garda Bangsa adalah lembaga PKB yang pernah menjaga gereja-gereja pada saat hari natal namun sering berjalannya waktu digantikan oleh Banser dari NU.

## REFERENSI

- Abd Rahman BP. 2022. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan". Al Urwatul Wutsqa. Volume 2 (01).
- Ali, H., & Limakrisna, N. 2013. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi)*. In Deepublish: Yogyakarta.
- Jarwanto. 2015. *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*. Mediatara: Yogyakarta.
- John W. Slocum, Jr. 2015 *Don Hellriegel, Principles of Organizational Behavior*. Cengage Learning: Canada,. Pp. 10.
- Malayu Hasibuan. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara : Jakarta. pp. 88.
- Ngalim Purwanto. 2017. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Sutarto Hp. 2015. *Manajemen Mutu Terpadu (MMT-TQM) Teori dan Penerapan Di Lembaga Pendidikan*. UNY Press: Yogyakarta.
- Yun Iswanto. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Terbuka: Tangerang pp. 63.
- Mukhtar dkk. 2016. *Pengembangan Karir Tenaga Pendidik: Teori dan Aplikasi*: Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta. pp. 26-27.
- Imron Fauzi, 2019 "Problematika Kebijakan Linierisasi dan Mutasi Guru di Kabupaten Jember", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12 (01), pp: 8.
- Haryanto, 2012: dalam artikel "pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarpisikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> diakses pada, [Desember 24, 2017
- Plendes Suluh Budiarta, 2018. *Strategi Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Srandakan, Skripsi UNY, : Yogyakarta*
- Bashori dkk, 2020. *Konsep Kepemimpinan Abad 21 Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam*. PRODU, Prokurasi Edukasi *Jurnal Manajemen*
- Taufik "Pemikiran Abdurrahman Wahid", 42. Naskah-Deklarasi," diakses pada 10-08-2023 <https://PKB.id/page/naskah-deklarasi..>
- Aditya Pramana, *Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Politik* (Medan : UNSUT, 2007), 36.
- M Arif Kurniawan, *Politik Islam Modern Dalam K.H Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017), 97.
- Muhammad Jupri, Wawancara Dengan Penulis, 10 Oktober 2023.
- 43 Khamami Zada, *Neraca Gus Dur di panggung kekuasaan* (Jakarta; lakusdam,1997),121.
- Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur : Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, 156.

Abdurrahman Wahid, *Tuhan tak Perlu di Bela* (Yogyakarta : LkiS, 1999), 21.

<sup>1</sup>Taufik “Pemikiran Abdurrahman Wahid”, 42.

Naskah-Deklarasi,” diakses pada 10-08-2023 <https://PKB.id/page/naskah-deklarasi>.

Taufik, “Pemikiran Abdurrahman Wahid”, 44.

Alim Roswanto , “ Filsafat Sosial-Politik Aristoteles dan Plato ” Refleksi 15, No. 2 (2015): 126.

Mukhamad Murdiono “Citra Penguasa Ideal dalam Perpektif Politik Ibnu Khaldum Dalam relevansinya Bagi Kepemimpinan di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Humaniora* 11. No. 2 (2006); 35.

Efendy Choiri, *PKB dari NU untuk Indonesia* (Jakarta; Bildung, 2003), 41.